

**PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI TENGAH PANDEMI COVID 19
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS
YOGYAKARTA

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Program
Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Pekerjaan Sosial**

**YOGYAKARTA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Dahalu
Nim : 19.200.010.042
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerja Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Umar Dahalu

Nim: 19200010042



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Dahalu
Nim : 19.200.010.042
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerja Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap untuk ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Umar Dahalu
Nim: 19200010042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-450/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN DI TENGAH PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMAR DAHALU
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010042
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6125d6b8408cb



Pengaji II

Dr. Muryanti, S.Sos., M.A.
SIGNED

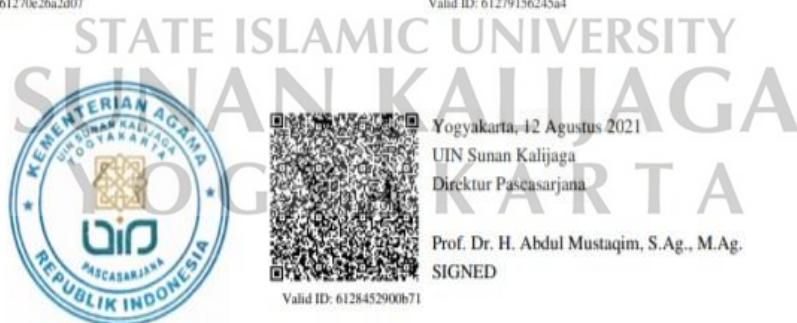
Valid ID: 61270e26a2d07



Pengaji III

Ro'fah, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 61279156245a4



Yogyakarta, 12 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6128452900b71

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN DI TENGAH PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT

Yang ditulis oleh :

Nama	: Umar Dahalu
NIM	: 19.200.010.042
Jenjang	: Magister (S2)
Prodi	: Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Pekerja Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Agustus 2021
Pembimbing

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Dr. Muryanti, S.Sos.,M.A

ABSTRAK

Nama : Umar Dahalu
NIM : 19.200.010.042
Judul : Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Tengah Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat

Penelitian ini mengenai pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin ditengah pandemic Covid 19 di Kabupaten Polewali Mandar yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan program kesejahteraan sosial terhadap masyarakat miskin di tengah pandemi di Kabupaten Polewali Mandar serta strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di tengah pandemi di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program-program bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat miskin yaitu pemerintah daerah melakukan pendataan dari setiap desa atau kecamatan yang ada di kabupaten Polewali Mandar selanjutnya data tersebut harus terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Kelurahan, walaupun pada kenyataannya pernyataan dari masyarakat yang menjadi narasumber dalam wawancara ada beberapa hal yang kontradiktif antara masyarakat dan pemerintah. Pertama, soal bantuan, ada beberapa masyarakat yang sudah didata oleh desa sebagai masyarakat miskin tetapi sampai sekarang belum mendapatkan bantuan. Kedua, pemerintah sudah menggelar sosialisasi lewat surat edaran ke semua kepala dusun namun hal tersebut tidak efektif karena banyak penerima yang tidak mengetahui nilai bantuan dan berapa lama program tersebut. Pendistribusian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat miskin di tengah pandemi di Kabupaten Polewali Mandar yaitu melalui prosedur yang ditentukan pemerintah daerah di mana pembagiannya sudah di tentukan berdasarkan data-data dari desa setempat Kegiatan itu benar dan harus dilakukan, karena dalam menjalankan suatu program apabila tidak diawasi, dikontrol, serta tidak adanya bimbingan lanjut maka program tersebut tidak tahu akan diarahkan kemana. Namun pada kenyataannya hal tersebut kurang efektif, karena masih banyak masyarakat miskin yang sudah masuk data tersebut dan memenuhi kriteria namun tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah.

Kata Kunci : Perlindungan Sosial ,Hak Kesejahteraan, Masyarakat Miskin

Abstract

This research is about the fulfillment of social welfare rights for the poor societies in the midst of pandemic of Covid 19 in Polewali Mandar Regency which aims to study and analyze the implementation of social welfare programs for the poor society in the midst of a pandemic in Polewali Mandar and the strategies that can be carried out as an effort to optimize the fulfillments of social welfare rights for the poor society in the midst of the pandemic in Polewali Mandar. This type of research is descriptive quantitative.

The data collection is done by conducting observation, interviews, documentation and reference searches. The result of research indicate that the application of the government assistance programs to the poor society those are the local government collect data from every village or sub-district in Polewali Mandar then the data must be registered with the DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Social Welfare Integrated Data) and show a certificate of not capable from village or ward, even though in reality the statements of the society who were the sources in the interviews there were several contradictory things between society and government. First, regarding assistant, there are several society that had been recorded by the village as a poor society but have not received assistant until now. Second, the government has conducted socialization through circulars to all hamlet head but this is not effective because many recipients do not know the value of the assistance and how long the program will take.

Distribution of assistance from the government to the poor society in the midst of a pandemic in Polewali Mandar Regency is through procedures that determined by the regional government where the distribution has been determined based on the data from local villages. The activity is right and must be done, because in carrying out a program if it is not supervised, controlled, and there is not further guidance, the program does not know where it will be directed. But in reality it is less effective, because there are still many poor society who have enter the data and fulfill the criteria but do not receive any assistance from the government.

Keywords: Social Protection, Welfare Rights, Poor Society

KATA PENGANTAR

Tiada ucapan yang patut dan pantas diucapkan atas terselesainya tesis yang berjudul **“Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Tengah Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat”**, kecuali ucapan syukur kepada Allah Swt., karena Dia-lah sumber kenikmatan dan sumber kebahagiaan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW., yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan, bimbingan serta dorongan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr.Phil.Al Makin, S.Ag.,M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Nina Mariana Noor, M.A selaku Ketua Program Studi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Muryanti, S.Sos.,M.A selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran bersedia membimbing saya dalam penulisan penelitian ini;
5. Informan peneliti yakni Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dan masyarakat Polewali Mandar;
6. Ibu saya Haeriah dan bapak saya Dahalu yang selalu mendoakan, memberi semangat dan memberikan bimbingan yang luar biasa untuk saya.
7. Kakak, Adik, Keponakan dan Kakak Ipar peneliti yang mendoakan, memberikan dukungan material dan non material sehingga sampai pada titik ini;
8. Teruntuk kekasihku Inzana Sahania, S.M yang senantiasa memberikanku motivasi dan dorongan serta mendampingiku sehingga karya tulis ini dapat tercapai tepat pada waktunya.

9. Sahabat-sahabat terbaik saya yang sampai saat ini mendukung peneliti secara material maupun non material yakni Sulfi Alis, S.H, Putra Huzain, S.Ars.
10. Teman-teman Kelas A Pekerja Sosial yang selalu mendukung dan memberi semangat yakni Jamiludin, Ummi, Raine, Zulaikha, Hanifa, Yusuf, Daniel, Zega, Ruri, dan Dhila.

Selesainya tesis ini adalah sebuah pencapaian tertinggi dalam dunia akademisi yang selama ini saya tempuh. Semoga tesis ini memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terlebih khusus pada bidang Ilmu pekerjaan sosial serta dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 25 Agustus

Peneliti



Umar Dahalu, S.Ag



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	01
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah.....	06
C. Tujuan Penelitian	06
D. Manfaat Penelitian	07
1. Manfaat Teoritis	07
2. Manfaat Praktis.....	07
E. Kajian Pustaka	07
F. Kerangka Teoritis	11
1. Social Protection.....	11
2. Kesejahteraan Sosial.....	23
3. Teori Kemiskinan	26
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data	39
4. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian	30

5. Lokasi Penelitian	32
6. Teknik Pengumpulan Data	34
7. Teknik Analisi Data.....	37
8. Teknik Keabsahan Data.....	37
H. Sistematika Pembahasan.....	38
BAB II PROGRAM-PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH	41
A. Program Keluarga Harapan	41
B. Program Bantuan Sosial Tunai(BST)	43
C. Program Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	46
D. Program Kartu Prakerja	46
E. Program Bantuan Subsidi Upah (BSU)	47
F. Program Kartu Sembako	49
G. Data Jumlah Kemiskinan di kabupaten Polewali Mandar.....	52
BAB III PENERAPAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI TENGAH PANDEMI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR	56
A. Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pemerintah di Kab. Polewali Mandar di Tengah pandemi	56
B. Masyarakat yang Menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah	62
C. Manfaat yang diterima masyarakat setelah Menerima Bantuan.....	65
D. Distribusi Program Bantuan dari Pemerintah kepada Masyarakat Miskin di Kab. Polewali Mandar	70
E. Analisis Perlindungan Sosial berdasarkan Program-program Bantuan yang dilakukan Pemerintah Daerah.....	72
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR TABEL	81
DAFTAR GRAFIK	82
DAFTAR LAMPIRAN	83

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh Novel Coronavirus (2019-nCoV), jenis baru coronavirus yang pada manusia menyebabkan penyakit mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Pada 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan nama penyakit yang disebabkan 2019-nCov, yaitu Coronavirus Disease (COVID-19). Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga 15 Januari 2021 tercatat sebanyak 882.418 kasus. Pasien sembuh bertambah 7.491 menjadi 718.696 orang. Kasus Kematian bertambah 238 menjadi 25.484 orang. Adapun jumlah kasus yang tercatat di Provinsi Sulawesi Barat tepatnya Kabupaten Polewali Mandar hingga Januari 2021 yaitu jumlah pasien positif Covid 1045 kasus, yang dirawat 71 orang, isolasi mandiri 252 orang, yang dinyatakan sembuh 691 dan meninggal sebanyak 31 orang¹.

Hal tersebut membuat pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaporkan telah membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Laporan dari Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Southeast Asia menyebutkan adanya peningkatan

¹ <http://www.dinkes.sulbarprov.go.id/>, Diakses tanggal 11 Januari 2021.

jumlah pengangguran sejak meluasnya Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia. Situasi ini akibat banyaknya perusahaan atau usaha-usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya. Penjual kehilangan pelanggannya. Banyak sektor-sektor usaha kecil menengah UKM kehilangan konsumen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa krisis ekonomi akibat Covid lebih daripada krisis ekonomi di tahun 1998. Sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid, terutama masyarakat menengah ke bawah. Beberapa program pun yang diperkenalkan pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu program non-reguler (4 program) dan program reguler (3 program).²

Prokontra pemenuhan hak masyarakat miskin dalam hal ini pemerintah masih belum memberikan sepenuhnya bantuan bagi masyarakat miskin. Meski pemerintah sudah membentuk berbagai macam bantuan namun realitasnya masyarakat masih banyak belum mendapatkan bantuan. Seperti dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya covid-19, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat. Karena antara SE Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri

dalam negeri berbeda. Dijelaskan di dalam poin 1 yaitu orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah dan berdinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematika, dan pada poin ke 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, dll dan lain-lain.²

Para pekerja yang bekerja diluar rumah tentu sangat merasakan dampak dari Covid-19 ini. Pekerja dipaksa untuk tidak bekerja padahal kebutuhan rumah tangga sangat banyak. Hal yang terjadi bagi para penjual akibat adanya pandemi ini adalah berkurangnya pembeli yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang diperoleh. Bagi para penjual jasa seperti menjahit, transportasi umum juga merasakan dampak nya seperti merosotnya orderan jahitan dan tidak adanya yang menggunakan jasa angkutan umum. Para petani pun ikut merasakan dampak dari Covid-19 ini, meskipun mereka tetap bisa bekerja di sawah tapi ekonomi mereka tetap melemah karena harga penjualan hasil kebunnya menurun drastis dan pembeli hasil kebun juga berkurang. Perias pengantin juga merasakan dampak ini, karena tidak adanya acara yang diadakan pada masa pandemi Covid-19. Dan berbagai lini pekerjaan ikut merasakan dampak dari pandemi ini yang menyebabkan lemahnya ekonomi warga. Oleh karena itu perlu adanya bantuan dari pemerintah.

² <https://aidran.org/2020/05/28/program-bantuan-sosial-dari-pemerintah-indonesia-di-masa-pandemi-covid-19/> diakses pada tanggal 28 juni 2021

³ Anisa Mufida, Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19, Buletin Hukum dan Keadilan, ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 (2020).

Bantuan sosial yang diberikan dapat membantu permasalahan ekonomi yang dialami warga Indonesia, khususnya dalam penulisan ini masyarakat Polewali Mandar. Akan tetapi dalam proses pembagian bantuan sosial ini terdapat berbagai polemik yang disebabkan karena data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak valid, seperti data warga yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar mendapatkan bantuan sosial. Selain itu juga ada data warga yang dulunya petani sekarang sudah menjadi pengusaha sukses atau yang dulunya honorer sekarang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap mendapatkan bantuan sosial. Karena itu, Kementerian Sosial menggunakan data lama, sehingga penerimaan bantuan sosial ini tidak tepat sasaran kepada warga yang benar benar terdampak Covid-19.

Adapun untuk provinsi Sulawesi Barat berdasarkan data pada bulan Maret 2020, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) sebesar 10,87 persen atau menurun 0,08 persen poin dibandingkan September 2019 dan menurun 0,15 persen poin dibandingkan Maret 2019. Secara absolute, jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Maret 2020 sebanyak 152,02 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 0,15 ribu jiwa jika dibandingkan September 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 0,62 ribu jiwa jika dibandingkan Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 9,41 persen

meningkat menjadi 9,59 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 11,43 persen menurun menjadi 11,26 persen pada Maret 2020.³

Tentu dapat juga kita lihat bagaimana pemerintah memberikan bantuan sebagai terbosan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar, misalnya Bantuan sosial jenis BST itu disalurkan mulai dari bulan April dan sampai November ini . Dari April, Mei, dan Juni banyak dana yang diberikan setiap bulannya adalah Rp600.000 untuk setiap KPM. Dari Juli, Agustus, dan September banyak dana yang diberikan setiap bulannya adalah Rp300.000 untuk setiap KPM. Cara penyaluran dana dilaksanakan dengan dua cara. Bagi mereka yang memiliki rekening bank, uang akan ditransfer ke rekening. Sementara, uang akan dikirim secara door to door bagi calon penerima yang tak memiliki rekening bank.

Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga terdampak Covid-19, di Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Penyaluran bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan mendapat pengawalan aparat Kepolisian. Tujuanya agar bantuan kepada warga terdampak pandemi covid-19, aman dan tepat sasaran.⁴

Berdasarkan fakta yang terjadi di kabupaten polewali mandar

³ Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, <https://sulbar.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/948/maret-2020--persentase-penduduk-miskin-di-sulawesi-barat-10-87-persen.html>.

⁴Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Pussu polman <https://makassar.tribunnews.com> di akses tanggal 1 juli 2022.

bahwa bantuan program yang telah di terima masyarakat tentu sangat bermanfaat namun ada beberapa masyarakat yang belum menerima secara langsung program tersebut karena ada beberapa kendala, seperti adanya tidak cocokan data dengan data di desa dan dinas sosial, tidak terupdate nya data yang di pegang oleh pemerintah, selain itu juga ada masyarakat yang sudah berdomisili sehingga tidak terdata sebagai penerima bantuan. Tentu hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat yang berhak sebagai penerima bantuan namun karena kondisi tersebut di atas mereka tidak mendapatkan bantuan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin di Tengah Pandemi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan program kesejahteraan sosial terhadap masyarakat miskin di tengah pandemi di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana distribusi bantuan dari Pemerintah kepada masyarakat miskin di tengah pandemi di Kabupaten Polewali Mandar?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan program kesejahteraan sosial terhadap masyarakat miskin di tengah pandemi di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis distribusi bantuan dari Pemerintah kepada masyarakat miskin di tengah pandemi di Kabupaten Polewali Mandar.

D. MANFAAT PENELITIAN

1.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah tentang penting kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin khususnya di kabupaten Polewali Mandar

1.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di tengah Pandemi di Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah daerah kabupaten Polewali Mandar dapat memperhatikan masyarakat miskin di tengah pandemi.

E. KAJIAN PUSTAKA

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai bahan pembanding atau rujukan dalam penulisan tesis ini yaitu:

Tesis karya Theresia Ngutra tahun 2017 dengan judul pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di Kota Makassar. Menarik sekali karena penelitian ini membahas tentang kondisi masyarakat miskin yang ada di kota Makassar selain tesis ini berupaya memberikan pemahaman bahwa penerapan program kesejahteraan sosial oleh pemerintah kota Makassar belum dilakukan secara optimal. Hal

tersebut terbukti, dimana masyarakat miskin ada yang belum mengenal program dan belum pernah mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun.

Adapula jurnal Erni Panca Kurniasih dengan judul Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. Jika di pahami lebih jauh, bentuk penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan analisa deskriptif dan eksploratif. Studi ini menggunakan analisis deskriptif sebagai alat analisa yang bertujuan untuk menganalisis keadaan masyarakat kota Pontianak saat pandemic Covid-19. selain itu metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, hasil observasi dan wawancara mendalam.

Terdapat juga jurnal Bima Jati dan Gilang Rizki Aji Putra dengan judul Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara. Menariknya penelitian ini memaparkan alternatif-alternatif yang perlu pemerintah coba lakukan untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, historis, dan kritis. Selain itu jurnal tersebut memberikan gambaran akan pentingnya optimalisasi pemerintah dalam mengatasi pandemi.

Adapun jurnal Hartini Retnaningsih dengan judul penelitian Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid 19 sebuah analisis terhadap kebijakan social pemerintah. Hasilnya menunjukkan, bantuan

sosial yang diberikan pemerintah tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan bagi pekerja lainnya, yaitu pekerja informal yang pendapatannya jauh lebih rendah dan mereka tidak terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada akhirnya tulisan ini menyarankan agar ke depan, pemerintah juga peduli kepada pekerja informal yang sesungguhnya lebih membutuhkan bantuan sosial dibanding pekerja formal yang sudah jelas status dan penghasilannya.

Hasil penelitian dari Ety Rahayu dengan judul penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Pengurus Koperasi Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya pemberdayaan dari pihak UPDB kepada pengurus/pengelola KJK PEMK, terutama dalam bentuk capacity building. Hal ini dimaksudkan agar para pengurus/pengelola KJK PEMK tersebut memiliki kemampuan dalam mengelola KJK PEMK.

Selanjutnya hasil penelitian dari Samsul Alil Bahri dengan judul penelitian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Al- Hidayah dapat dilihat dari ketercapaian dalam realitas implementasi di lapangan: (1).Memberikan ilmu bahkan kesempatan kerja bagi masyarakat yang kurang beruntung di dunia kerja; (2).Merangkul orang-orang yang butuh bantuan dari segi pendapatan.

Untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan atau program kerja maka perlu dilihat bukan hanya dari segi upaya yang telah dilakukan, akan tetapi dapat diketahui pula melalui program kegiatan yang diberikan:

a. Program Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Al-Hidayah.

Adapun Kegiatan pelatihan yang diberikan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Al-Hidayah dalam hal meningkatkan efektivitas guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kecamatan Tombolo Pao sebagai berikut: (1). Pelatihan Keterampilan Pembuatan membuat pembuatan sirup markisa, dodol markisa, selai markisa, dodol tomat, manisan tomat, selai tomat, dodol labu siam, kerupuk labu kuning, keripik pisang, dodol pisang dan aneka olahan bonggol pisang, (2). Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Kegiatan menabung dibentuk oleh pengelola dan anggota.

Penelitian dari Siti Abidah Lubis dengan judul penelitian Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran dan peran Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sidiangkat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang miskin. Dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengalami beberapa hambatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan diantaranya adalah pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala bagi pihak PKH dalam meratakan pemberian penerima bantuan PKH, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu maka persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat, serta pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat ditengah pandemi covid 19 berupa bantuan sosial dari pemerintah, yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini merangkum dari beberapa penelitian terdahulu dan penelitian ini juga berbeda lokasinya dengan penelitian terdahulu sehingga penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Polewali Mandar.

F. KERANGKA TEORI

1. Social Protection

Social Protection atau Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Perlindungan sosial merupakan

sebuah konsep luas yang selalu berkembang seiring dengan perjalanan zaman. Pemerintah dan berbagai organisasi di dunia telah melakukan usaha perluasan perlindungan sosial hingga pada negara-negara berkembang dalam beberapa dekade ke belakang. Melalui kebijakan perlindungan sosial, pemerintah negaranegara di dunia berusaha menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses atas layanan sosial bagi seluruh penduduknya. Cakupan dalam kebijakan pendekatan perlindungan sosial diantaranya meliputi penjaminan keamanan pendapatan pokok, yang dapat berbentuk bantuan dan jaminan sosial, seperti dana pensiun bagi penduduk usia lanjut serta penyandang disabilitas, tunjangan bantuan penghasilan, jaminan pekerjaan, serta layanan bagi para pengangguran dan penduduk miskin. Kebijakan perlindungan sosial juga mencakup penyediaan akses universal akan pelayanan sosial yang terjangkau dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar seperti akses terhadap air dan sanitasi, ketahanan pangan, perumahan, dan layanan lainnya.⁵

Definisi dari perlindungan sosial telah cukup banyak dikemukakan oleh berbagai organisasi dan lembaga di dunia. International Labour Organization (ILO) (1984) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sebuah sistem yang disediakan melalui serangkaian kebijakan publik untuk meminimalkan dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang dapat disebabkan oleh hilangnya

⁵ https://www.bappenas.go.id/files/5114/2889/4558/Perlindungan_Sosial_di_Indonesia-Tantangan_dan_Arah_ke_Depan. Di akses tgl 23 agustus 2021

atau berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari, penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian. Sistem perlindungan sosial yang komprehensif diantaranya dapat terdiri dari program jaminan sosial, bantuan sosial, serta mencakup skema-skema bantuan dan jaminan dana yang didanai oleh pemerintah maupun kontribusi dari pesertanya.⁶

a. Landasan Konseptual Perlindungan Sosial

Konsep perlindungan sosial terbagi menjadi dua dimensi dalam memperluas jaminan sosial, yang terdiri dari serangkaian jaminan sosial pokok bagi semua orang (dimensi horisontal), serta pelaksanaan secara bertahap dengan standar yang lebih tinggi (dimensi vertikal). Hal ini sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 102 tahun 1952 mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial. Perlindungan sosial tidak semata terbatas pada bantuan sosial dan jaminan sosial. Menurut Barrientos dan Shepherd (2003), perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaring pengaman sosial. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas (Conway, de Haan dkk.; 2000).

⁶ https://www.bappenas.go.id/files/5114/2889/4558/Perlindungan_Sosial_di_Indonesia-Tantangan_dan_Arah_ke_Depan. Di akses tgl 23 agustus 2021.

Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka. Landasan perlindungan sosial erat kaitannya dengan Agenda Pekerjaan yang Layak (ILO, 2012) . Untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan, landasan perlindungan sosial harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro pekerja. Saat ini, beberapa negara sudah memasukkan elemen-elemen utama tersebut ke dalam sistem perlindungan sosial yang mereka miliki. Pada negara-negara dengan penghasilan menengah ke bawah, akses pada program perlindungan sosial sejalan dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan dan transformasi sosial lainnya.

Menurut Scott (2012), konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam, pengangguran, hingga kematian. Fokus perlindungan sosial yang terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut kerap

dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. Dengan meningkatnya perhatian dunia untuk mendukung pembangunan yang lebih merata, secara bertahap perlindungan sosial berevolusi menjadi sistem yang lebih berfokus kepada tindakan preventif dan promotif dalam jangka panjang. Pendekatan konsep perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-penyebab kemiskinan dan berusaha untuk mengatasi batasan-batasan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh penduduk rentan.⁷

Berdasarkan hal tersebut secara umum perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Tujuan utama yang diharapkan dengan terlaksananya perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan; meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosialekonomi; serta, memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak

⁷ https://www.bappenas.go.id/files/5114/2889/4558/Perlindungan_Sosial_di_Indonesia-Tantangan_dan_Arah_ke_Depan. Di akses tgl 23 agustus 2021

diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam bab ini, penjelasan mengenai perlindungan sosial secara lebih lanjut akan difokuskan menjadi dua bagian, yakni bantuan sosial serta jaminan sosial.

b. Bantuan Sosial

Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (in-cash transfers), juga dalam bentuk barang dan pelayanan (in-kind transfers). Setiap bantuan bisa bersifat sementara, karena adanya situasi sosial tertentu seperti; bencana, resesi ekonomi, atau adanya kebijakan pemerintah tertentu. Selain itu bantuan juga dapat bersifat tetap khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak telantar.

Berbagai definisi dari program bantuan sosial sendiri telah cukup banyak diungkapkan oleh lembaga-lembaga di dunia. Menurut ILO, skema bantuan sosial merupakan skema bantuan yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya minimum bagi individu dan rumah tangga yang hidup dibawah standar penghasilan tertentu tanpa mempertimbangkan aspek kontribusi dari individu dan rumah tangga penerimanya. Penentuan penerima bantuan

umumnya dilakukan berdasarkan tingkat pendapatan penduduk serta kriteria sosial ekonomi lainnya. Skema bantuan sosial dapat difokuskan kepada kelompok target tertentu (seperti keluarga miskin dengan anak, hingga penduduk lanjut usia dengan penghasilan yang terbatas) atau juga dapat diberikan sebagai bantuan pendapatan secara umum bagi pihak yang membutuhkan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan bantuan sosial sebagai bantuan yang ditargetkan kepada rumah tangga yang termasuk kedalam segmen terbawah dari distribusi pendapatan dan disediakan untuk mencegah terjadinya kesulitan yang ekstrem dantara penduduk yang tidak memiliki sumber daya, mengurangi eksklusi sosial, meminimalkan disinsentif untuk tenaga kerja, dan meningkatkan kecukupan bagi rakyat miskin. Manfaat diberikan seperti program jaminan sosial, namun tanpa menggunakan skema asuransi sosial dan tanpa membutuhkan pembayaran atau kontribusi dari penerima manfaatnya (Adema, 2006). Food and Agricultural Organization (FAO) mendefinisikan bantuan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi, atau membantu rumah tangga

untuk mengantisipasi risiko yang ada (FAO, 2003). ADB mendefinisikan bantuan sosial sebagai program yang dirancang untuk membantu individu, rumah tangga, dan komunitas paling rentan untuk memenuhi dan meningkatkan standar hidupnya (Howell, 2001). DFID mendefinisikan bantuan sosial sebagai transfer kepada masyarakat yang layak dengan dasar kerentanan atau kemiskinan tanpa menggunakan skema kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan yang dimaksud dapat berupa transfer sosial hingga beberapa bentuk inisiatif seperti pembebasan biaya atas layanan pendidikan dan kesehatan (DFID, 2005). International Monetary Fund (IMF) mendefinisikan bantuan sosial sebagai instrumen yang ditujukan untuk memitigasi dampak buruk dari bentuk-bentuk perubahan kondisi bagi masyarakat yang tergolong miskin.

Perkembangan awal skema bantuan sosial di Indonesia

sesungguhnya telah muncul sejak masa pemerintahan orde baru.

Mulai pada masa krisis ekonomi 1997-1998 pemerintah Indonesia

mengukuhkan skema bantuan sosial secara lebih masif. Hal ini

terlihat dengan lahirnya regulasi yang mendukung pelaksanaan

program bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi

masyarakat miskin, seperti Undang-Undang No.11 tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang No.13 tahun

2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Program bantuan sosial

secara konseptual dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan telantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic living needs), sehingga dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat sebagai pelaksanaan amanat konstitusional bagi pemerintah pusat dan daerah. Kerangka bantuan sosial berfokus pada penanggulangan risiko dan kerentanan yang dihadapi baik oleh individu, keluarga, maupun komunitas. Risiko dan kerentanan ini terdiri dari dua bentuk; Pertama, risiko dan kerentanan yang datang dari dalam, atau dikenal dengan kerentanan siklus hidup serta bersifat permanen sehingga akan ditangani dengan program bantuan sosial yang bersifat reguler. Kedua, risiko dan kerentanan yang datang dari luar, misalnya disebabkan oleh bencana alam, guncangan ekonomi, dan guncangan sosial. Risiko semacam ini ditangani dengan program bantuan sosial yang bersifat temporer sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah. Hingga saat ini, program bantuan sosial tersebut terus mengalami transformasi dan perkembangan bentuk sehingga dapat berjalan secara terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.⁸

⁸ Raditia Wahyu Supriyanto dkk, PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN ARAH KE DEPAN, Jakarta, Bappenas, 2014

c. Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tunjangan pendapatan (income support) dan/atau penanggungan biaya ketika sakit, kecelakaan saat bekerja, kelahiran, usia lanjut, serta kematian. ILO menggambarkan jaminan sosial sebagai sebuah mekanisme penggabungan risiko finansial. Jaminan sosial pada umumnya menggunakan prinsip asuransi sosial, yaitu didasarkan pada mekanisme risk sharing dalam suatu kelompok penduduk yang memiliki tingkat risiko yang heterogen, dimana penduduk wajib menjadi peserta dan berkontribusi dengan membayar premi. Dengan kata lain, penanganan risiko dihadapi secara gotong royong oleh para pesertanya melalui pengelolaan dana pertanggungan yang dikumpulkan dari kontribusi premi. Jaminan sosial secara umum mensyaratkan bahwa para peserta memiliki sumber penghasilan yang relatif tetap dan sebagian dapat disisihkan untuk membayar premi. Hak dari peserta atas manfaat dari program jaminan sosial dijamin oleh catatan kontribusinya.⁹

Salah satu sistem jaminan sosial yang paling awal terbentuk dilaksanakan pada akhir abad ke-19 di Jerman. Pada masa itu, beberapa pemerintah daerah di Jerman membantu pemerintah pusat

⁹Habibullah, PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPREHENSIF DI INDONESIA SOCIAL PROTECTION COMPREHENSIVE IN Indonesia, *Artikel*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur

untuk menghimpun “dana penyakit”, dimana kontribusi dari dana tersebut mayoritas berasal dari kaum pekerja. Selanjutnya, mulai terbentuk program-program jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, serta program jaminan hari tua.

Program-program tersebut diselenggrakan secara bersama oleh pekerja, pemberi kerja, serta negara dengan bagian kontribusinya masing-masing. Cikal bakal program jaminan sosial di Jerman mulai diikuti oleh berbagai negara Eropa dan sekitarnya, hingga pada tahun 1930an, program jaminan sosial telah mulai diadopsi di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Amerika Latin. Setelah berakhirnya masa perang dunia kedua, implementasi program jaminan sosial kembali meluas. Program-program jaminan sosial mulai diadopsi oleh negaranegara di daerah Afrika, Asia, serta Karibia. Hingga saat ini, program-program jaminan sosial terus mengalami transformasi di berbagai negara yang mengadopsinya.

Perbedaan utama program jaminan sosial dengan program bantuan sosial terletak pada aspek kontribusi dari penerima manfaatnya, pendanaan, dan kepesertaan. Pemberian manfaat dari program bantuan sosial tidak bergantung kepada kontribusi yang diberikan oleh penerima manfaat, sementara program jaminan sosial terikat dengan syarat kontribusi dari penerima manfaatnya.

Sumber pendanaan bantuan sosial umumnya berasal dari pajak, sedangkan jaminan sosial secara mandiri dibiayai oleh iuran/kontribusi pesertanya. Program bantuan sosial juga umumnya ditargetkan pada kelompok penduduk tertentu yang cukup spesifik, seperti penduduk miskin, lanjut usia, atau penyandang disabilitas berat. Sedangkan jaminan sosial diperuntukkan bagi seluruh penduduk atau kelompok penduduk yang lebih luas, misalnya kelompok pekerja. Secara umum, program jaminan sosial memiliki tujuan untuk menekan dampak risiko yang dapat terjadi kepada masyarakat saat masyarakat mengidap sakit, mengalami disabilitas, mengalami kecelakaan saat bekerja, melahirkan, dalam keadaan pengangguran, memasuki usia senja, dan mengalami kematian melalui tunjangan pendapatan.

Di Indonesia sendiri, tonggak dari sistem jaminan sosial diperkuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Melalui undang-undang tersebut, Indonesia diamanatkan untuk memiliki sebuah sistem jaminan sosial yang dapat memberikan jaminan keterpenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk peserta program jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN kembali diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang tersebut

menjelaskan secara lebih rinci pelaksanaan sistem jaminan sosial di Indonesia yang terdiri dari program jaminan sosial bidang kesehatan serta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.¹⁰

2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹¹

Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Kesejahteraan Sosial banyak dikemukakan oleh para ahli dan lembaga yang memperhatikan banyaknya masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Sebagaimana yang tertuang pengertian kesejahteraan sosial menurut para ahli sebagai berikut :

a. Walter A. Fridlander

Mendefenisikan Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-

¹⁰Raditia Wahyu Supriyanto dkk, PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN ARAH KE DEPAN, Jakarta, Bappenas, 2014

¹¹Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Defenisi di atas menjelaskan bahwa: Pertama Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem atau “organized system” yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Kedua, Tujuan sistem tersebut adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. Ketiga tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara, meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pertolongan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan, standar kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

b. Secara Konseptual

Pengertian kesejahteraan sosial termuat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, pasal1 ayat 1 adalah sebagai berikut : “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”

Mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut dilaksanakan berbagai upaya, program dan kegiatan tersebut “Usaha Kesejahteraan Sosial” baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang No.11 Tahun 2009 bagian II pasal 25 juga menjelaskan secara tegas tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meliputi:

1. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
5. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. selain itu Kesejahteraan sosial di negara-negara

maju, disebut dengan jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*social insurance*), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.¹²

3. Teori Kemiskinan

Secara umum, ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relative. Kemiskinan absolute dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (basic need) yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Apabila pendapatan tersebut tidak mencapai kebutuhan minimum, maka dapat dikatakan miskin. Sehingga dengan kata lain bahwa kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan relatif yaitu apabila seseorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti tidak miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya walaupun pendapatannya sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar

¹² Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama,2006, hlm. 3.

minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin.

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kekurangan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan. Hal ini tergantung tidak hanya pendapatan, tetapi juga pada akses ke layanan. Ini termasuk kurangnya penghasilan sumber daya produktif untuk menjamin penghidupan berkelanjutan, kelaparan dan kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, terbatas atau kurangnya akses kependidikan dan layanan dasar lainnya, peningkatan morbiditas dan kematian dari penyakit, tunawisma dan perumahan yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, diskriminasi sosial dan eksklusi.¹³

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk

¹³ Cica Sartika dkk, Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, Jurnal Ekonomi (JE) Vol .1(1), April 2016, E-ISSN: 2503-1937.

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dan generalisasi.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perlindungan sosial dalam menjelaskan prespektif untuk membahas objek penelitian. Pendekatan Perlindungan Sosial adapun pengertian umum perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Perlindungan sosial merupakan sebuah konsep luas yang selalu berkembang seiring dengan perjalanan zaman. Pemerintah dan berbagai organisasi di dunia telah melakukan usaha perluasan perlindungan sosial hingga pada negara-negara berkembang dalam beberapa dekade terakhir.

Kemiskinan dengan fokus penduduk miskin yang meliputi fakir miskin dan komunitas fakir dan komunitas adat terpencil, selain miskin juga mengalami keterpenciran secara geografis yang mengakibatkan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan. Potensi dan sumber

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 2017, Bandung: Alfabeta, hlm. 9.

kesejahteraan sosial dalam pengelolaan pembangunan berbasis masyarakat (*community based*) dengan fokus sumber daya manusia merupakan modal dasar mencakup tenaga kesejahteraan sosial, organisasi dan kelembagaan sosial masyarakat, jaringan kesejahteraan sosial, nilai dasar kesejahteraan sosial, yaitu keperintisan, kejuangan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.¹⁵

Definisi dari perlindungan sosial telah cukup banyak dikemukakan oleh berbagai organisasi dan lembaga di dunia. International Labour Organization (ILO) (1984) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sebuah sistem yang disediakan melalui serangkaian kebijakan publik untuk meminimalkan dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang dapat disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari, penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian. Sistem perlindungan sosial yang komprehensif diantaranya dapat terdiri dari program jaminan sosial, bantuan sosial, serta mencakup skema-skema bantuan dan jaminan dana yang didanai oleh pemerintah maupun kontribusi dari pesertanya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan data

¹⁵ Dr. Syamsuddin AB, S.Ag., M.Pd *Benang- Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*. Cet.I (Jawa Timur, maret 2017) h 104-105

¹⁶ https://www.bappenas.go.id/files/5114/2889/4558/Perlindungan_Sosial_di_Indonesia-Tantangan_dan_Arah_ke_Depan. Di akses tgl 23 agustus 2021.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data primer berupa wawancara secara langsung dan observasi partisipatif yang dilakukan oleh peneliti.
2. Data sekunder yakni berupa dokumen atau Standar operasional prosedur (SOP) dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, atau kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh kepala bidang maupun kepala dinas sosial Provinsi Sulawesi Barat tentang pemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di tengah pandemi.
4. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

Subjek atau informan ialah orang-orang yang berhubungan dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar atau objek penelitian.¹⁷ Adapun yang akan dijadikan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pejabat struktural, pejabat fungsional, dan masyarakat miskin di kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling* dalam pemilihan subjek. *Purposive subject* adalah teknik pengambilan

¹⁷ Papalia, dkk, *Human Development*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm 310.

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁸

Pertimbangan tertentu ini misalnya:

1. Pejabat struktural, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini yaitu berperan dominan dalam pembuatan kebijakan.
2. Pejabat fungsional, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial.

Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam proses penelitian ini meliputi, pejabat fungsional dan pejabat struktural dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kriteria
1	Syarifuddin Amin, S.IP	Kepala Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial	Pejabat Fungsional
2	Ilham Baharuddin, S.E, M.S.i	Anggota Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial	Pejabat Fungsional
3	Nasrullah	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tapango	Pejabat Struktural
4	Nurpancawati muis	Rehabilitasi Sosial	Pejabat Struktural

Tabel 1.1 : Pejabat dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

3. Masyarakat di kabupaten Polewali Mandar yang dianggap sebagai masyarakat miskin di tengah pandemi.

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian, hlm 219.

No	Nama	Pekerjaan
1	Sukma	Ibu rumah tangga
2	Lawia	Ibu rumah tangga
3	Juma'ati	Pedagang
4	Kane	Pedagang
5	Cira	Ibu rumah tangga
6	Sayuti	Ibu rumah tangga

Tabel 1.2: Data-data masyarakat miskin

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan data-data masyarakat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini sebagai bagian dari masyarakat miskin yang menerima bantuan dari pemerintah.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar yang beralamat di Jl. H. Andi Depu, Lantora, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berkaitan dengan judul penelitian yaitu Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin di Tengah Pandemi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Indikator Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang dijadikan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat, Adapun capaian kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar dan perbandingannya dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut : Angka kemiskinan Kab. Polewali Mandar mengalami penurunan

setiap tahun. Namun bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Polewali Mandar angka kemiskinannya tertinggi tahun 2019 yaitu sebesar 15,60. Walaupun demikian bila dilihat dari kinerja penurunan angka kemiskinan dari tahun 2015-2019, Kabupaten Polewali Mandar memiliki laju penurunan jauh lebih besar dibandingkan dengan laju penurunan angka kemiskinan dari kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.¹⁹

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa di Kabupaten Polewali mandar angka kemiskinan yang relative lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain, hal tersebut menjadi temuan-temuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini tentunya memiliki rancangan alokasi waktu untuk mempermudah peneliti sehingga penelitian ini dapat selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun susunan jadwal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar. www.polman.go.id, diakses 23 agustus 2021.

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Penyusunan Proposal Tesis								
2	Bimbingan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Perbaikan Tesis								
5	Penelitian dan Penulisan Tesis								
6	Ujian Tesis								

Tabel 1.3 : Jadwal Penelitian Tesis

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam hal pengumpulan data ini harus menggunakan teknik yang tepat agar data yang didapat bisa tepat dan akurat sesuai dengan realitas di lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya.²⁰

Observasi atau pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang

²⁰ Herdiansyah, Haris, 2015, *Wawancara Observasi dan Focus Group*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 130

bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.²¹

Teknik yang dipilih dalam penelitian ini yakni observasi partisipatif. Observasi partisipatif ini dilakukan dengan melihat langsung kondisi masyarakat miskin di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²² Jadi wawancara merupakan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa pertanyaan kepada informan dengan tujuan mendapatkan informasi yang di inginkan melalui jawaban dari informan.

²¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 2009) hlm.101.

²² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2017), hlm 186

Adapun beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.²³

Wawancara dilakukan bagi masyarakat miskin yang terdampak covid 19, baik di pedesaan maupun di kota polewali mandar. Begitu juga wawancara dilakukan bagi pemerintah setempat. Mengapa masyarakat miskin karena masyarakat miskin dalam hal ini sangat rentan dengan diskriminasi. Banyak dari masyarakat miskin dibatasi dalam berargumentasi dibatasi ruang gerak dll. Begitu juga pemerintah, mengapa pemerintah dalam hal ini perlu untuk di wawancara karena, pemerintah sebagai penentu penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak covid 19. Oleh karena itu, penulis tertarik akan melakukan wawancara untuk penelitian tesis.

Teknik wawancara yang dipilih dalam penelitian ini yaitu wawancara semi-terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk

dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hlm. 233.

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²⁴

Wawancara semi-terstruktur ini dilakukan peneliti kepada pejabat struktural, pejabat fungsional, dan masyarakat miskin yang terdampak Covid 19 di Kabupaten Polewali Mandar.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni berupa foto pada saat wawancara langsung dengan masyarakat miskin di Kabupaten Polewali Mandar.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

²⁴ *Ibid*, hlm.233.

²⁵ *Ibid.*, hlm.240.

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁶

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi data, yaitu mengkode, meringkas, dan mengkategorisasi data untuk menentukan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan isu-isu penelitian.
2. Pengorganisasian data, yaitu proses mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tema-tema atau pokok bahasan tertentu dan menyajikan datanya dalam teks.
3. Interpretasi data, menentukan pola-pola, kecenderungan dan penjelasan yang dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat diuji lebih lanjut.
8. Teknik Keabsahan Data

Untuk mengukur tingkat keabsahan data dalam penelitian ini maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Triangulasi menjadi salah satu teknik yang dilakukan.

Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.²⁷ Data yang digunakan peneliti

²⁶ *Ibid*, hlm.244.

²⁷ *Ibid*, hlm.241.

yakni hasil observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi

Terdapat tiga model triangulasi diantaranya: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Tringulasi sumber yakni peneliti mewawancarai pejabat struktural (Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat), pejabat fungsional (kemensos), yang akan dibandingkan seperti apa penjelasan mengenai Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin di Tengah Pandemi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi barat.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan adalah cara penyajian yang disusun secara sistematis. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara utuh, menyeluruh, dan sistematis tentang tesis yang ditulis oleh peneliti sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Dalam penulisan ini terdapat empat bab, dimana bab yang satu dengan bab lainnya saling berkesinambungan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Adapun keempat bab tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I, adalah gambaran secara umum mengenai apa yang akan diteliti, yakni Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin di Tengah Pandemi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

BAB II, Berisi tentang program-program bantuan sosial dari pemerintah ke masyarakat miskin di tengah pandemi

BAB III Berisi tentang hasil penelitian bagaimana penerapan program bantuan dari pemerintah ke masyarakat dan bagaimana distribusi bantuan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di tengah pandemi di Kabupaten Polewali Mandar.

BAB IV merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan Tesis.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan program kesejahteraan sosial terhadap masyarakat miskin di tengah pandemi di Kabupaten Polewali Mandar

Adapun penerapan program-program bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat miskin yaitu pemerintah daerah melakukan pendataan dari setiap desa atau kecamatan yang ada di kabupaten Polewali Mandar selanjutnya data tersebut harus terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Kelurahan, walaupun pada kenyataannya pernyataan dari masyarakat yang menjadi narasumber dalam wawancara ada beberapa hal yang kontradiktif antara masyarakat dan pemerintah. Pertama, soal bantuan, ada beberapa masyarakat yang sudah didata oleh desa sebagai masyarakat miskin tetapi sampai sekarang belum mendapatkan bantuan. Kedua, pemerintah sudah menggelar sosialisasi lewat surat edaran ke semua kepala dusun namun hal tersebut tidak efektif karena banyak penerima yang tidak mengetahui nilai bantuan dan berapa lama program tersebut. Serta belum tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, karena masih ada beberapa masyarakat yang belum tersentuh program bantuan dari pemerintah daerah meskipun telah terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Untuk itu

perlunya evaluasi kembali bagi pelaksanaan program-program tersebut, sehingga masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan haknya demi kesejahteraan sosial.

1. Distribusi bantuan dari Pemerintah kepada masyarakat miskin di tengah pandemi di Kabupaten Polewali Mandar

Pendistribusian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat miskin di tengah pandemi di Kabupaten Polewali Mandar yaitu melalui prosedur yang ditentukan pemerintah daerah yang mana pembagiannya sudah di tentukan berdasarkan data-data dari desa setempat. Pendistribusian yang dilakukan adalah melakukan sistem program, melakukan monitoring, bimbingan dan tindak lanjut serta evaluasi program. Kegiatan itu benar dan harus dilakukan, karena dalam menjalankan suatu program apabila tidak diawasi, dikontrol, serta tidak adanya bimbingan lanjut maka program tersebut tidak tahu akan diarahkan kemana.

Namun pada kenyataannya hal tersebut kurang efektif, karena masih banyak masyarakat miskin yang sudah masuk data tersebut dan memenuhi kriteria namun tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah. Sehingga perlu adanya evaluasi kembali mengenai penyaluran bantuan-bantuan tersebut, baik dari segi data-data yang di peroleh dari Desa atau kelurahan dan dari segi penyaluran bantuan.

2. Saran

Bagi pemerintah daerah agar untuk mengkaji ulang pelaksanaan dari program –program banuan sosial yang dijalankan baik itu dari segi data-data masyarakat yang tergolong tidak mampu dan memastikan kembali bantuan tersebut sampe ke masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Cica Sartika dkk, Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, Jurnal Ekonomi (JE) Vol .1(1), April 2016, E-ISSN: 2503-1937.

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama,2006, hlm. 3.

Erni Panca Kurniasih, Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak, Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020 ISBN: 978-602-53460-5-7.

Herdiansyah, Haris, 2015, *Wawancara Observasi dan Focus Group*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015).

Isbaniah, Fathiyah dkk, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease Covid 19, Kementerian Sosial RI, (Jakarta: 2020).

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2017).

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 2009).

Papalia, dkk, *Human Development*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Pemerintah Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo) <http://eprints.ums.ac.id/>, Diakses tanggal 10 Januari 2021.

Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabets,2017)

Rahman Mulyawan, Masyarakat, Wilaya, dan Pembangunan, (Upad Press, 2016).

Ririn Noviyanti Putri, Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 705-709, ISSN 1411-8939.

Rohiman Notowidagdo, Pengantar Kesejatraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa, (Jakarta: Amzah, 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 2017, Bandung: Alfabeta.

Yuliana, Corona virus diseases Covid-19); Sebuah tinjauan literatur, Article, Volume 2, Nomor 1, February 2020, p. 187 – 192 ISSN 2655-9951 (print), ISSN 2656-0062.

Seri Jefri Adil Waruwu, Analisi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penganguran, Belanja Pemerintah dan Investasi terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014. Skripsi 2016



Internet

<https://sulbar.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/948/maret-2020-persentasependuduk-miskin-di-sulawesi-barat-10-87-persen.html>.

<https://tirto.id/dampak-covid-19-angka-kemiskinan-indonesia-melonjak-264-juta, fQ9M>, Diakses tanggal 11 Januari 2021.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, “Covid-19 WHO”.
<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. Diakses tanggal 15 Januari 2021.

<http://www.dinkes.sulbarprov.go.id/>, Diakses tanggal 11 Januari 2021

<https://makassar.tribunnews.com/2021/04/19/agar-tepat-sasaran-polisi-kawal-penyaluran-blt-dana-desa-di-desa-pussu-polman>. diakses tanggal 1 juli 2021

<https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/document/PERMEN SOS %20NOMOR%202020%20TAHUN%202019>. diakses tanggal 1 Agustus 2021

PERMEN SOS NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf diakses tanggal 2 Agustus 2021

https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf diakses tanggal 2 Agustus 2021

<https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/document/Kepmensos%20No.%2054-HUK-2020>. diakses tanggal 2 Agustus 2021

SPKD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 di akses tanggal 3 Agustus 2021

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pejabat dari DINSOS	23
Tabel 1.2 Data-data Masyarakat Miskin	24
Tabel 1.3 Jadwal Penelitian Tesis	25
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	36



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Polewali Mandar	52
Grafik 2.2 Ukuran Kemiskinan Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2011 - 2019 (Publikasi) Sulawesi Barat - Kabupaten Polewali Mandar	53
Grafik 2.3 Ukuran Kemiskinan Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2011 - 2019 (Publikasi) Sulawesi Barat - Kabupaten Polewali Mandar [Keparahan Kemiskinan (P2)].....	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran foto dokumentasi saat wawancara dengan Pejabat Dinas Sosial

Lampiran foto dokumentasi saat wawancara dengan masyarakat

Lampiran pertanyaan wawancara untuk Pejabat Dinas Sosial

Lampiran pertanyaan wawancara untuk masyarakat

